

Satu Data Referensi dan Data Master Untuk Aplikasi Umum

Oktorialdi, Ph.D.

*Staf ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan,
Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,
Kementerian PPN/ Bappenas*

Disampaikan dalam Tantangan Transformasi Digital Pemerintah
Nasib Aplikasi Sejenis setelah Aplikasi Umum Ditetapkan - Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Jakarta, 18 November 2021

Agenda

1

Gambaran Umum Satu Data Indonesia

2

**Pentingnya Integrasi Data Pemerintah
dalam Pengelolaan Data Induk
(Data Master)**

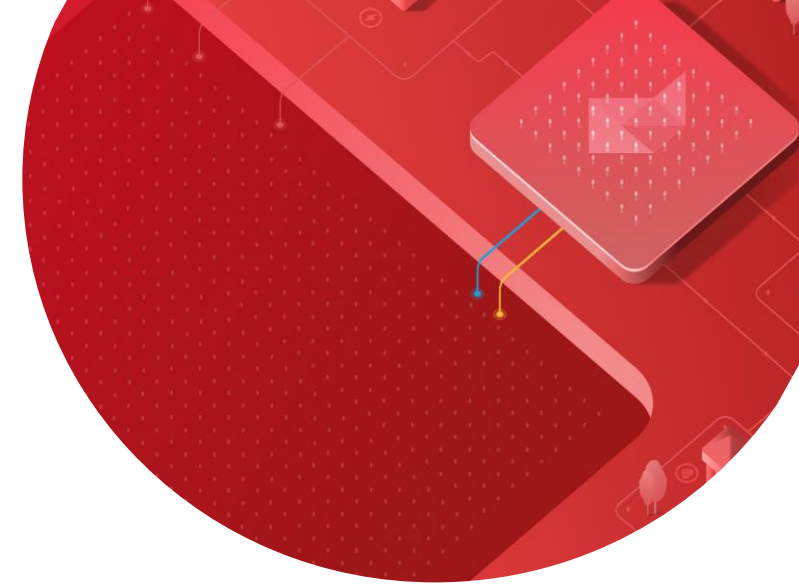
3

Portal SDI untuk Berbagi Pakai Data

1

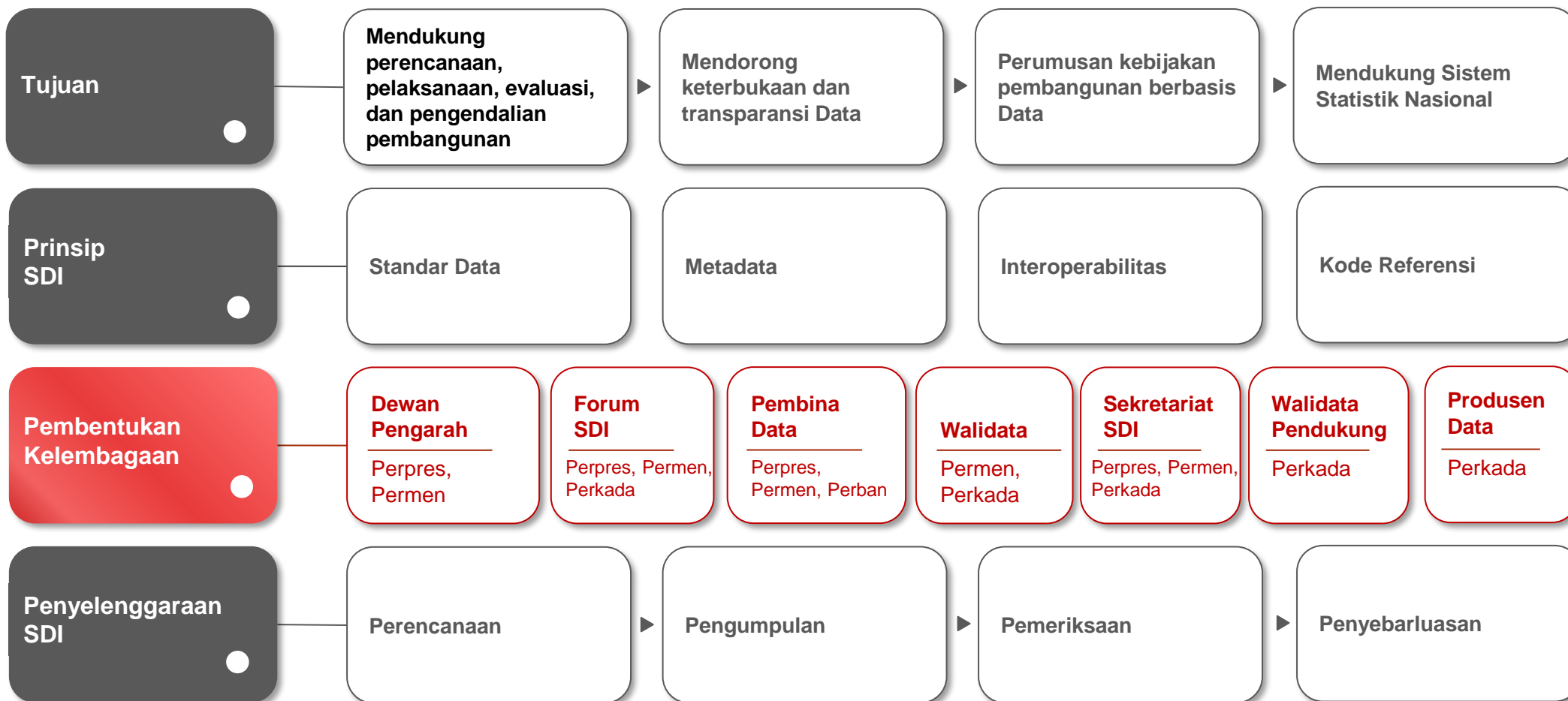


Gambaran Umum Satu Data Indonesia

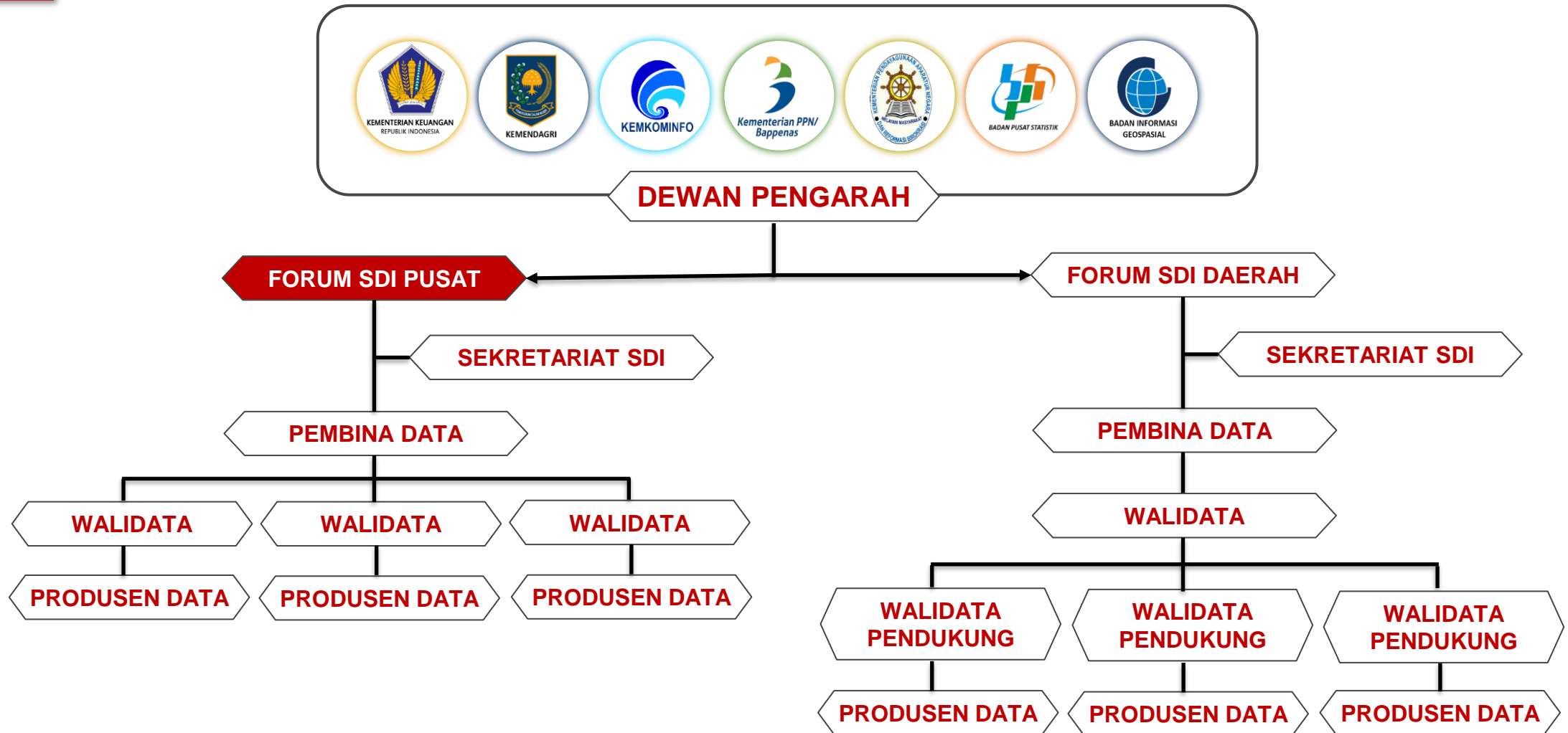




Gambaran Umum Penyelenggaraan Satu Data Indonesia



Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia



Perkembangan Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia

1 Standar Data dan Metadata



Data Statistik

- Peraturan BPS Nomor 4 tahun 2020 tentang **Juknis Standar Data Statistik**
- Peraturan BPS Nomor 5 tahun 2020 tentang **Juknis Metadata Statistik**
- Peraturan BPS Nomor 126 tahun 2020 tentang **Masterfile Standar Data Statistik**

Data Spasial

- SE Kepala BIG No.6/2021 tentang **Pedoman Standar Data dan Struktur - Format Baku Metadata Spasial**

Data Keuangan Negara

- Pedoman standar data dan metadata keuangan melekat pada pedoman-pedoman pengoperasian aplikasi keuangan dengan mengacu pada **IFMIS** (Integrated Financial Management Information System)

3 Kode Referensi dan Data Induk

Referensi Penduduk

- **NIK** sebagai **referensi tunggal penduduk Indonesia** sesuai dengan UU No 23 tahun 2006 diperkuat dengan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia 2021 dan arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021

Referensi Kewilayahan

- *Bridging* / relasi antar **Kode Wilayah Administrasi** (Kode Wilkerstat, Kode Wilayah Administrasi Kemendagri, Kode Pos) dalam sig.bps.go.id

Referensi Fasyankes

- Forum Satu Data Indonesia tematik 2021 tentang penyepakatan **pemaduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan** bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan dalam proses drafting Kepmenkes tentang Kode Referensi Fasyankes

2 Interoperabilitas



- Penyiapan pemanfaatan server **PDN** untuk *storage* Portal Satu Data Indonesia
- Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan **JIGN**
- Pengembangan major sistem dalam **Portal** Satu Data Indonesia (target operabel akhir tahun 2021)
- Perencanaan dan penganggaran **pengembangan lanjut** Portal Satu Data 2022





2

Pentingnya Integrasi Data Pemerintah dalam Pengelolaan Data Induk (Data Master)

Pentingnya Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia menjadi **sangat penting** untuk **diimplementasikan**



Pandemi Covid-19 mendorong 'paksa' **implementasi layanan digital** pemerintah ke level yang belum pernah kita alami sebelumnya, **data menjadi komponen wajib**

Hal-hal tersebut sangat bergantung pada **kualitas data** yang dijadikan **dasar pengambilan kebijakan** dan pelaksanaan program

Penggunaan dasar (data) yang **tidak reliable** dalam agenda massif seperti pemulihan Nasional **berisiko** menimbulkan **inefisiensi / pemborosan sumber daya dan program yang tidak tepat guna atau tepat sasaran**

Kunci kesuksesan pemulihan Nasional terletak pada **responsivitas, akurasi, adaptabilitas, dan kolaborasi**

- Satu Data mendorong **integrasi data dan layanan pemerintah** melalui **standarisasi tata kelola data** dan **interoperabilitas**, layanan pemerintah terintegrasi tidak bisa terwujud jika kondisi data masih tersebar dan dengan standar yang beragam
- Dengan data dan layanan pemerintah yang terintegrasi, masyarakat selaku pengguna layanan akan **dimudahkan** dalam **mengakses** dan **memanfaatkan layanan** pemerintah
- Melalui upaya **manajemen** dan **penjaminan kualitas** data, proses pengambilan **keputusan**, perumusan **kebijakan**, dan pengembangan **layanan** dapat lebih terarah dan berbasis fakta



Data and Development Cycle

Data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas (tepat guna, tepat sasaran, adaptif, berkelanjutan, dan progresif). Pembangunan yang berkualitas akan menghasilkan data yang berkualitas pula.



Potensi Data untuk Integrasi

SUMBER DATA

Pemerintah Pusat
87 K/L



Keuangan Negara
Pembina Data :
Kementerian Keuangan

Keuangan Pusat

Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah
Prov/Kab/Kota



Statistik
Pembina Data :
Badan Pusat Statistik

Statistik Dasar

Statistik Sektoral

Statistik Khusus

Umum



Geospasial
Pembina Data :
Badan Informasi Geospasial

Informasi Geospasial Dasar

Informasi Geospasial Tematik



Data Lainnya
Pembina Data : Belum
ditentukan

JENIS DATA

CONTOH INTEGRASI DATA

Alokasi Bansos Covid
Nasional



Prosentase Penduduk
Miskin / Wilayah



Alokasi Optimal Bansos
Covid / Wilayah

Pendapatan
Nelayan



Penduduk
Miskin



Data Sasaran Bantuan
Sosial untuk Nelayan

Penduduk
Miskin



Peta Wilayah
Administrasi

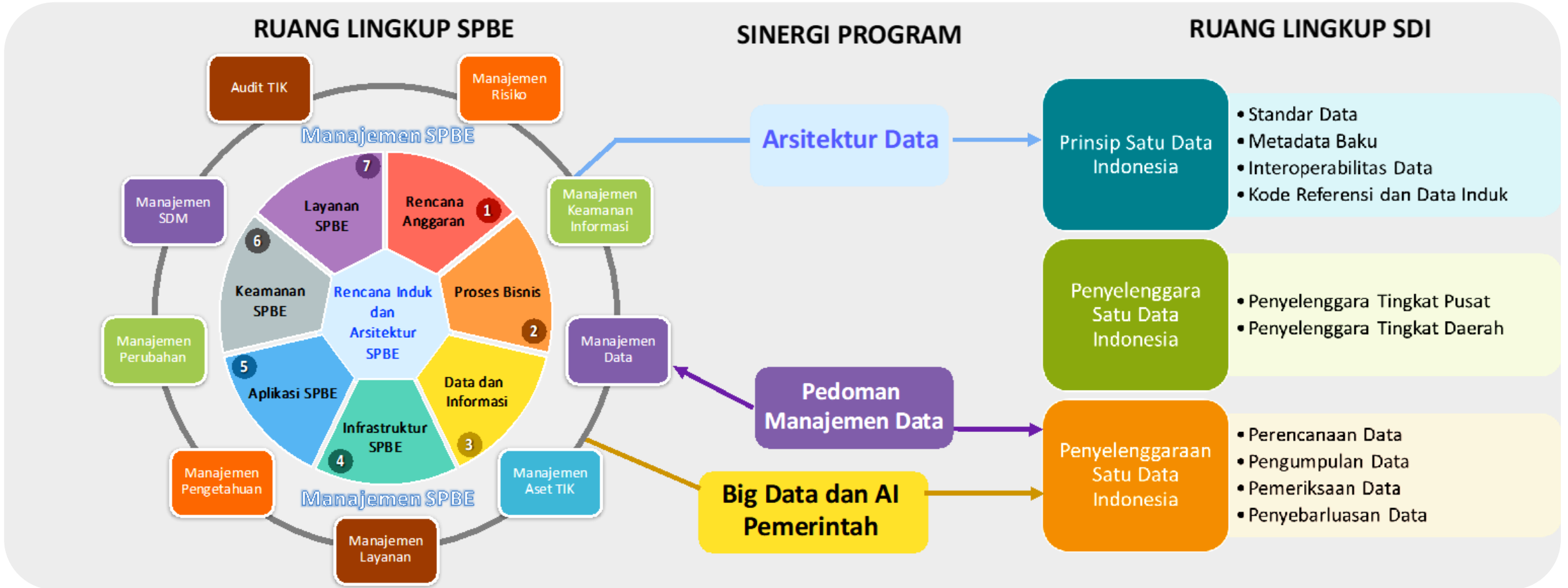


Peta Kemiskinan Wilayah



Sinergi Kebijakan Pemerintah

SPBE & SDI



Sumber: Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Kementerian PANRB, 2021

Kebijakan Percepatan SPBE

Perpres No.95 Tahun 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Tujuan SPBE

1

Mewujudkan **tata Kelola pemerintahan** yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel

2

Mewujudkan **pelayanan publik** yang berkualitas dan terpercaya

3

Meningkatkan **keterpaduan** dan efisiensi penyelenggaraan SPBE

Aplikasi Umum

Bidang Kearsipan



- Integrasi layanan kearsipan dinamis
- Target: **SELESAI**
(Aplikasi SRIKANDI)

Aplikasi Umum

Bidang Pengaduan Masyarakat



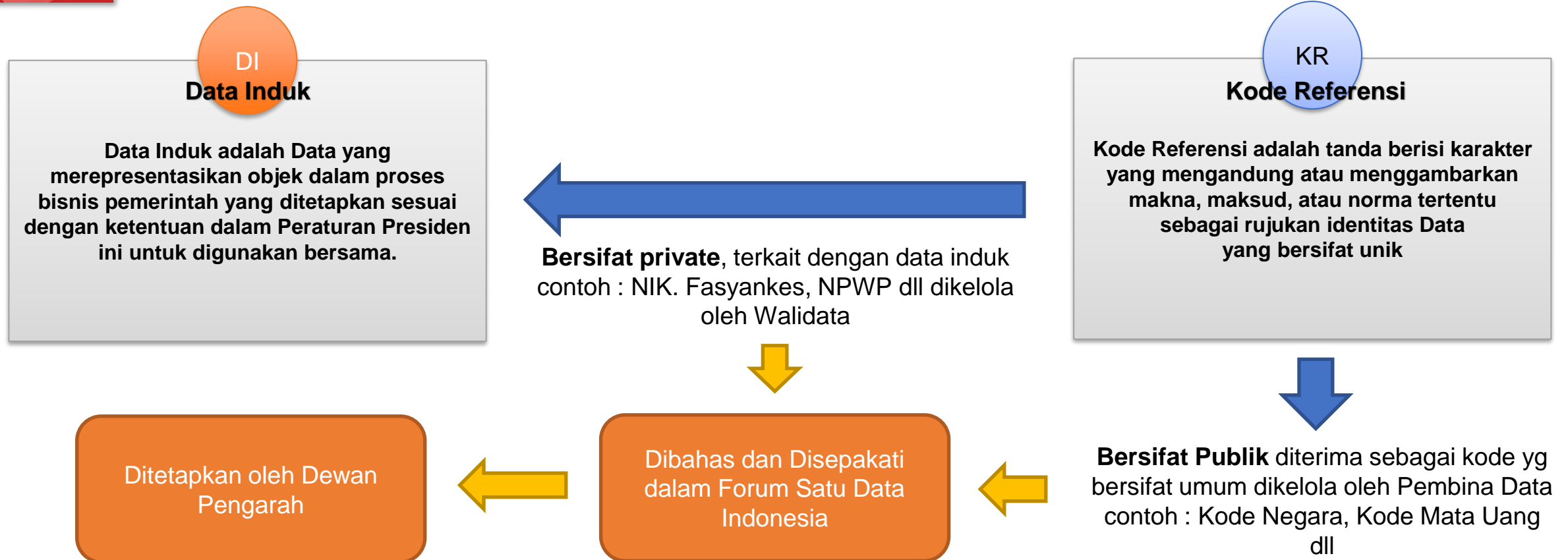
- Integrasi pengaduan pelayanan publik
- Target: **SELESAI**
(Aplikasi SP4N-LAPOR!)

**Koordinator:
Kementerian PANRB**

PASAL 62 s.d. 69 PERPRES 95/2018

Definisi Kode Referensi & Data Induk

PerPres No.39/2019 ttg Satu Data Indonesia



1. Data yang Pembina Datanya belum ditetapkan; atau
2. Forum Satu Data tidak mencapai kesepakatan terhadap Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk

Definisi Data Referensi dan Data Induk

PerMenPPN No.16/2020 ttg Manajemen Data SPBE

DI

Data Induk

Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia

Manajemen Data Induk

Manajemen Data Induk adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Induk.

Master Data Management

KR

Kode Referensi

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik

Merupakan Bagian dari

DR

Data Referensi

Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintergrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.

Manajemen Data Referensi

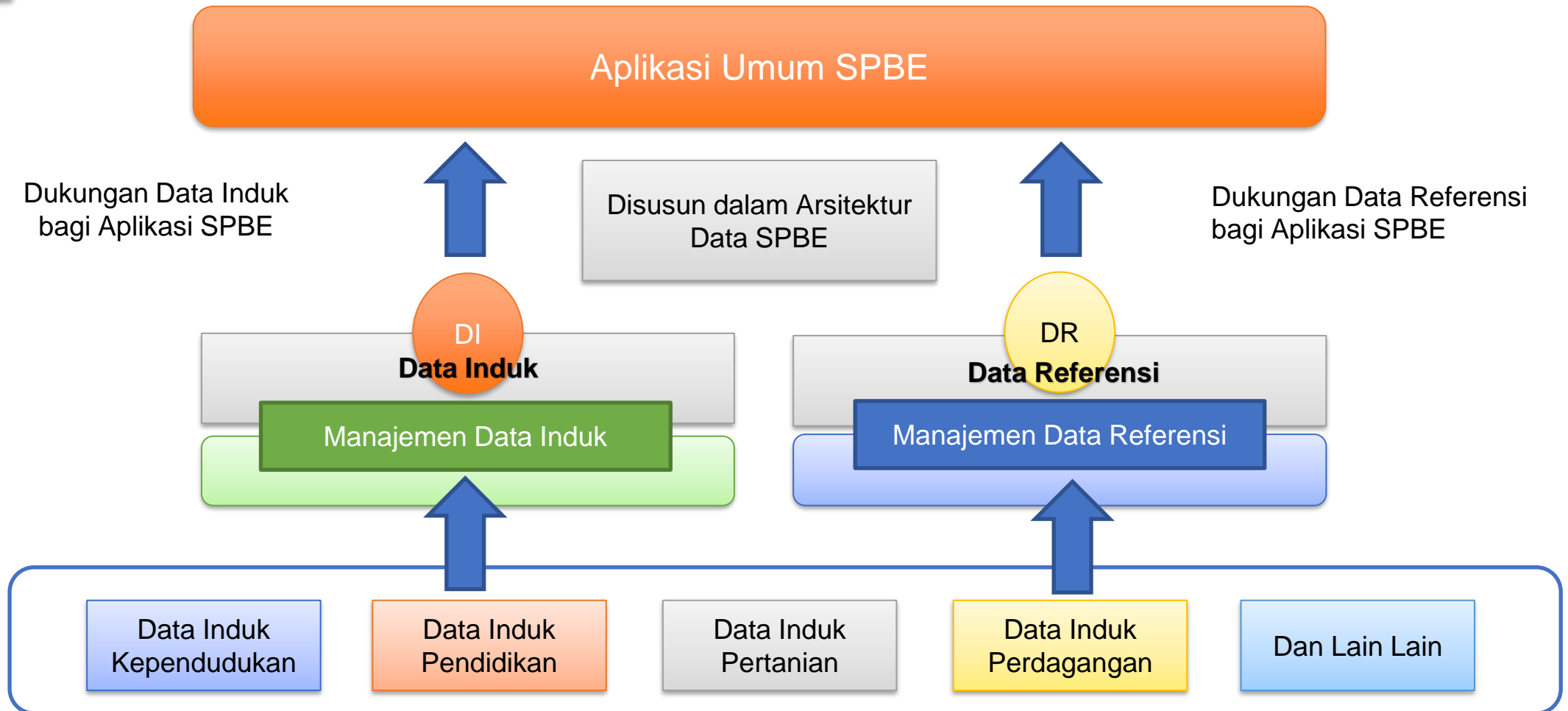
Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.

Reference Data Management

Perencanaan Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat berdasarkan

- Daftar Data;
- usulan Pembina Data; dan
- arahan Dewan Pengarah Satu Data Indonesia.

Peran Data Referensi dan Data Induk dalam SPBE



Konsolidasi dan Transformasi Data Induk di setiap K/L/D ke dalam Domain Informasi SPBE dengan tetap menjaga otoritas pengelolaan Walidata Kode Referensi dan Data Induk Sesuai Perpres No.39/2019



Peran Penting Daftar Data & Metadata dalam Integrasi Data

Metadata Data K/L/D

1	DATA K/L/D
2	Konsep
3	Definisi
4	Klasifikasi
5	Ukuran
6	Satuan
7	Jadwal Pemutakhiran
8	Format
9	Link Akses Data
10	Pembatasan Akses
11	Produsen Data
12	Nama Aplikasi
13	

Daftar Data SDI

1	DATA
2	Konsep
3	Definisi
4	Klasifikasi
5	Ukuran
6	Satuan
7	Jadwal Pemutakhiran
8	Format
9	Link Akses Data
10	Pembatasan Akses
11	Tag Prioritas
12	Tag RAB SPBE
13	Tag RAD SPBE
14	Tag SDGs
15	

Metadata Dataset (untuk Penyebarluasan)

1	DATASET
2	Data dalam Dataset
3	Jadwal Pemutakhiran
4	Format
5	Pembatasan Akses
6	Sumber
7	Link Publikasi
8	Penyusun
9	

**Atribut metadata dapat ditambahkan/disesuaikan sesuai arahan Pembina Data dan Pengguna Data

Penulisan Definisi dalam metadata menjadi faktor yang sangat penting untuk melakukan *lineage* dan *match-making*.

Proses Pembentukan Katalog Data SDI

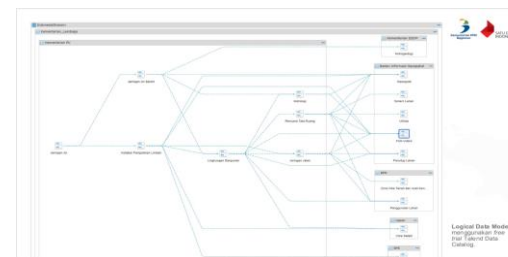
Pemetaan Data & Metadata Nasional

1 Pengumpulan Daftar Data dan Metadata

2 Pengorganisasian Metadata (kategorisasi, klasifikasi, dll)

3 Penyebarluasan Daftar Data dan Metadata untuk dimonitor dan diperbarui bersama

4 Manajemen Metadata Bisnis (*business glossary*)

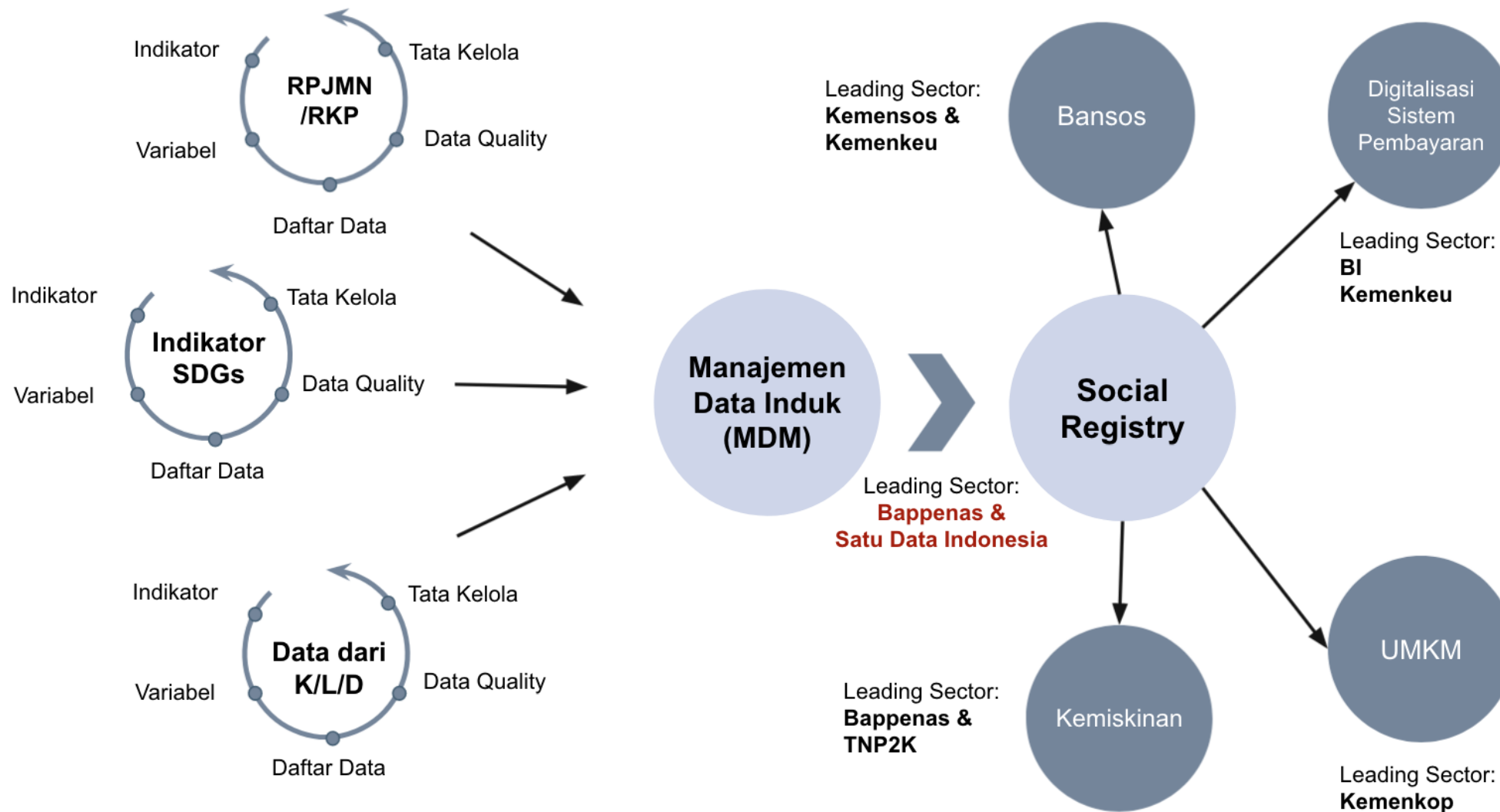


5 Pemetaan data dan penentuan tata kelola data (termasuk walidata atas data induk)

6 Penyebarluasan Katalog Data



Pengelolaan Data Induk





3

Portal SDI untuk Berbagi Pakai Data



Penyelenggaraan Bagipakai Data dalam SDI



Data disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia dan Media Lainnya

Sampai saat ini, instansi dapat menggunakan media lain untuk menyebarluaskan data sepanjang **terintegrasi** dengan Portal Satu Data Indonesia

Pengembangan Media Penyebarluasan/Bagipakai Data

Pengembangan media penyebarluasan/bagipakai data oleh instansi dilaksanakan dengan mengikuti perundangan yang berlaku tentang **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia

Data yang diakses di Portal Satu Data Indonesia Tidak Dipungut Biaya

Dalam melakukan akses dan bagipakai data melalui Portal Satu Data Indonesia **antar instansi pemerintah** tidak ada biaya yang dikenakan

Data yang diakses di Portal Satu Data Indonesia Tidak Perlu MoU

Dalam melakukan akses dan bagipakai data melalui Portal Satu Data Indonesia **antar instansi pemerintah** tidak diperlukan adanya nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama

Kerjasama Data Tertentu

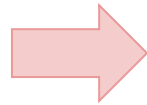
Dalam hal diperlukan kerjasama khusus/tematik/tertentu antar instansi dalam pelaksanaan bagipakai data, Walidata Instansi Pemrakarsa berkoordinasi melalui Forum Satu Data dengan melibatkan Pembina Data



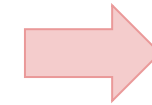
Satu Data Indonesia dan Keterbukaan Informasi Publik

Perpres 39 / 2019

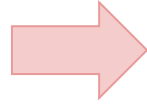
Tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Dan pengendalian pembangunan



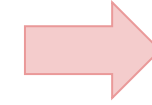
Evidence Based Policy



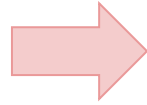
Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pemerintah



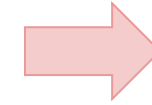
Accountable Government



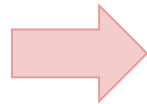
Menjamin hak untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik



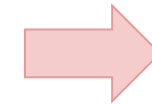
Open Government



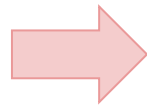
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik



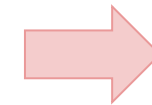
Participative Government



Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa



Progressive Government



Good Government

Mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Government*) yang didukung oleh tata kelola kebijakan yang baik, data yang berkualitas, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

UU 14 / 2008

Daftar Data dalam Portal SDI

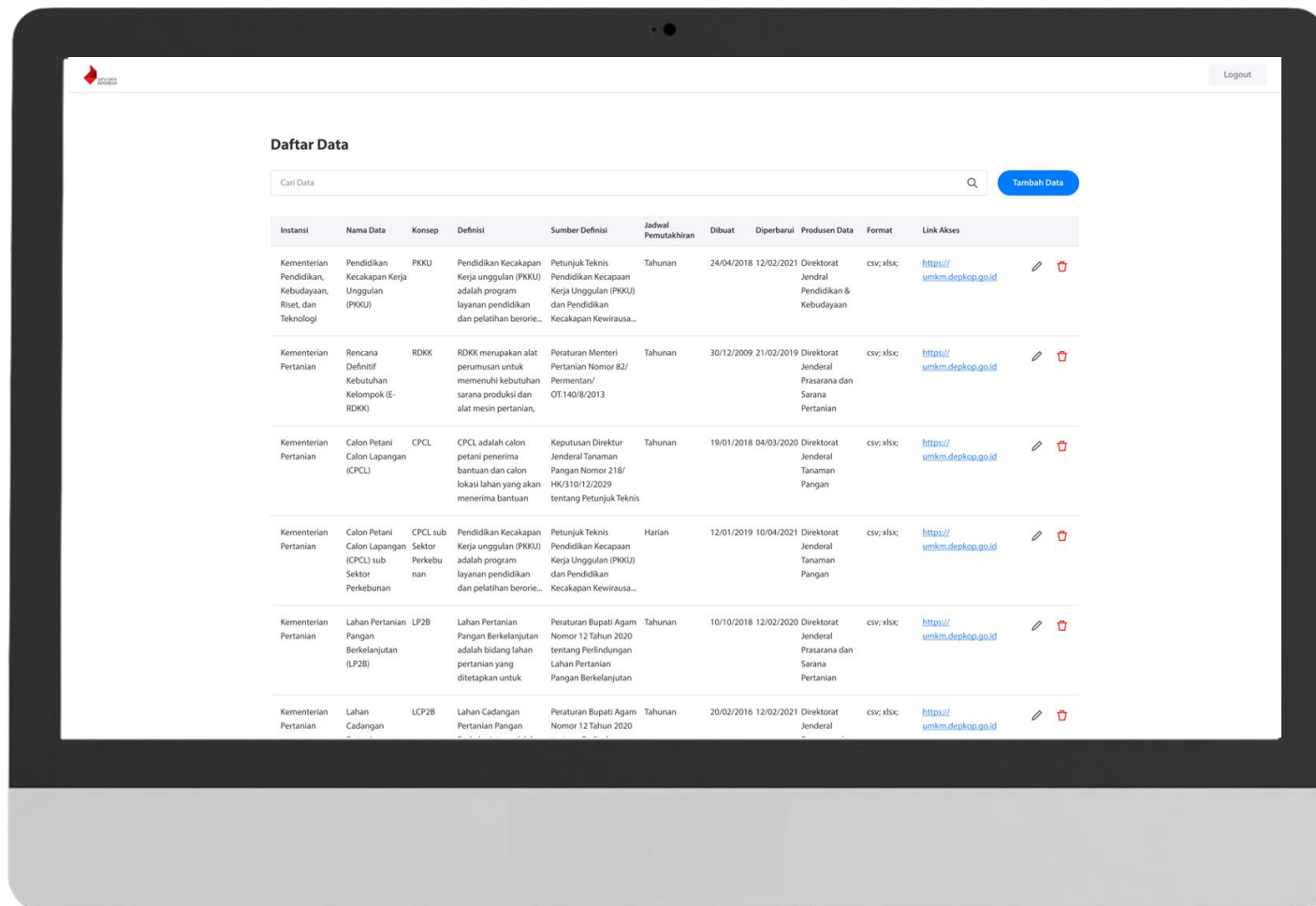
(tahap pengembangan – Kick Off: 8 Oktober 2021)

Portal Daftar Data Prioritas

1. *Self Service* pengisian metadata hingga level variabel
2. Akses (terbatas) untuk seluruh pengampu data dan Pembina Data
3. Dapat melakukan identifikasi data lain yang berpotensi untuk diintegrasikan
4. Bahan untuk penyusunan data model dan integrasi data tahap selanjutnya

Memuat

- Nama Data
- Konsep
- Definisi
- Sumber Definisi
- Jadwal Pemutakhiran
- Dibuat
- Last Updated
- Produsen Data
- Data Induk
- Format
- Link Akses



The screenshot shows the 'Daftar Data' (Data Register) page of the SDI portal. It features a search bar at the top with a 'Tambah Data' (Add Data) button. Below the search bar is a table listing various data entries. Each entry includes details such as the institution (Instansi), data name (Nama Data), concept (Konsep), definition (Definisi), source of definition (Sumber Definisi), update schedule (Jadwal Pemutakhiran), creation date (Dibuat), last update date (Diperbarui), data producer (Produsen Data), format (Format), and access link (Link Akses). The table also includes edit and delete icons for each entry.

Instansi	Nama Data	Konsep	Definisi	Sumber Definisi	Jadwal Pemutakhiran	Dibuat	Diperbarui	Produsen Data	Format	Link Akses
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU)	PKKU	Pendidikan Kecakapan Kerja unggulan (PKKU) adalah program layanan pendidikan dan pelatihan berorientasi...	Petunjuk Teknis Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU) dan Pendidikan Kecakapan Kewirausahaan...	Tahunan	24/04/2018	12/02/2021	Direktorat Jendral Pendidikan & Kebudayaan	csv; xlsx	https://umkm.depkop.go.id
Kementerian Pertanian	Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK)	RDKK	RDKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian,	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT/1408/2013	Tahunan	30/12/2009	21/02/2019	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	csv; xlsx	https://umkm.depkop.go.id
Kementerian Pertanian	Calon Petani Calon Lapangan (CPCL)	CPCL	CPCL adalah calon petani penerima bantuan dan calon lokasi lahan yang akan menerima bantuan	Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 218/HK/310/12/2029 tentang Petunjuk Teknis	Tahunan	19/01/2018	04/03/2020	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	csv; xlsx	https://umkm.depkop.go.id
Kementerian Pertanian	Calon Petani Calon Lapangan (CPCL) sub Sektor Perkebunan	CPCL sub Sektor Perkebunan	Pendidikan Kecakapan Kerja unggulan (PKKU) adalah program layanan pendidikan dan pelatihan berorientasi...	Petunjuk Teknis Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU) dan Pendidikan Kecakapan Kewirausahaan...	Harian	12/01/2019	10/04/2021	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	csv; xlsx	https://umkm.depkop.go.id
Kementerian Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	LP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk	Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Tahunan	10/10/2018	12/02/2020	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	csv; xlsx	https://umkm.depkop.go.id
Kementerian Pertanian	Lahan Cadangan	LCP2B	Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2020	Tahunan	20/02/2016	12/02/2021	Direktorat Jenderal	csv; xlsx	https://umkm.depkop.go.id



Highlight Portal SDI

Pengembangan 2021

Open Data	<ul style="list-style-type: none">• Data untuk akses publik• Data untuk akses penyelenggara SDI• Informasi dan Layanan Forum SDI
Manajemen User & Hak Akses	<ul style="list-style-type: none">• Pengaturan akses data berbasis <i>user role</i> dan organisasi
Permintaan Data	<ul style="list-style-type: none">• Permintaan data tertentu (non publik)
<i>Business Intelligence</i>	<ul style="list-style-type: none">• Modul untuk analitik dan <i>dashboard</i>
Manajemen API	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen Interoperabilitas antar system dengan Portal SDI berbasis API
Manajemen Keamanan	<ul style="list-style-type: none">• Keamanan Portal dengan modul audit trail & log, segala aktifitas dalam Portal SDI akan terdata / terpantau
<i>Content Management System</i>	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen konten dalam Portal seperti publikasi, infografis, dan sejenisnya

Portal Satu Data Indonesia

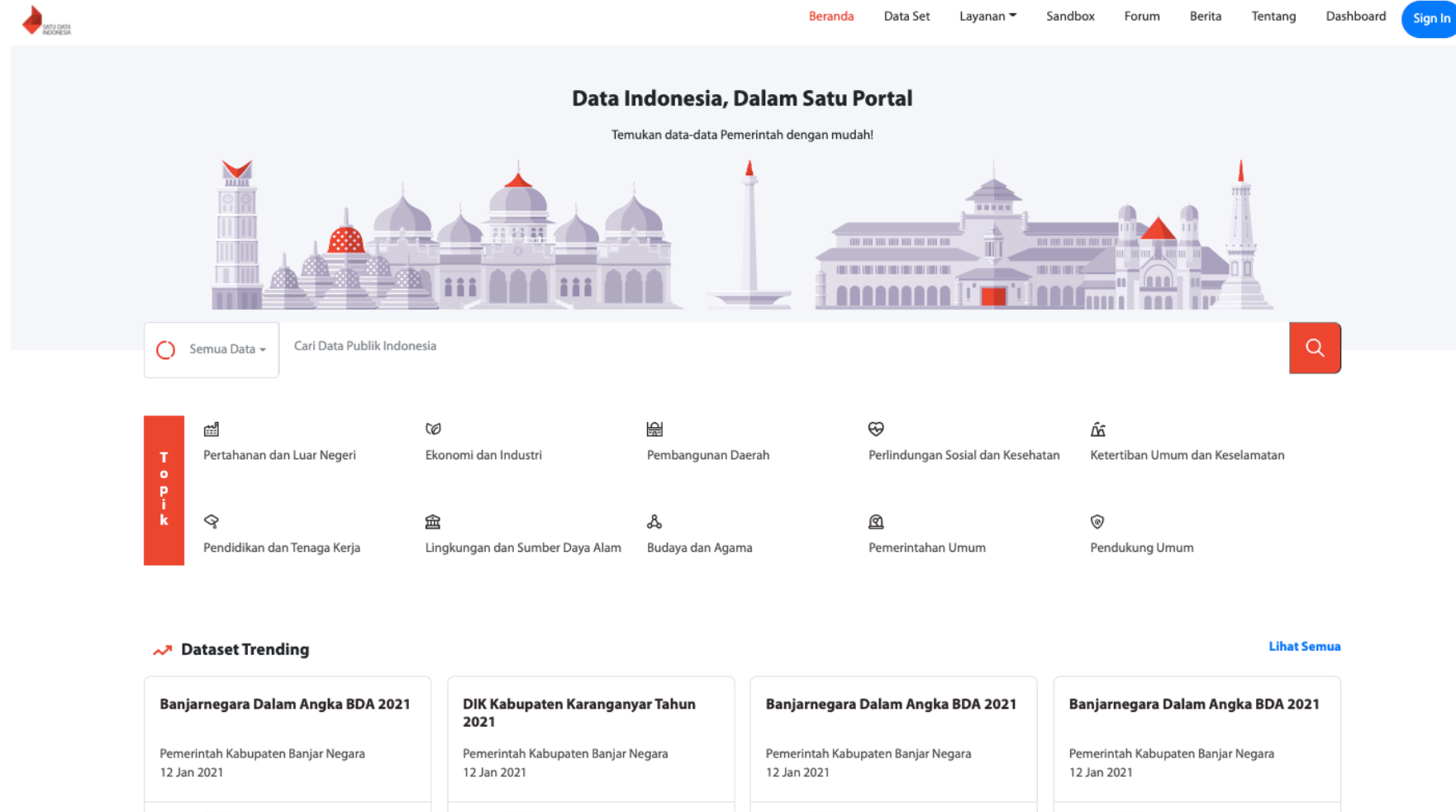
Dalam Tahap Pengembangan - Launch Desember 2021

Portal Open Data

Portal yang berisi data yang sudah sesuai dengan Prinsip SDI, dan bersifat terbuka (hak akses ditentukan oleh Wali Data melalui Forum SDI)

Portal Forum SDI

Portal dengan hak akses terbatas, yang memiliki beberapa fasilitas untuk mendukung terciptanya Satu Data (kualitas data, penyelesaian permasalahan data, dan kebijakan terkait data lainnya)



The screenshot shows the main interface of the Satu Data Indonesia portal. At the top, there is a navigation bar with links for Beranda, Data Set, Layanan, Sandbox, Forum, Berita, Tentang, Dashboard, and a Sign In button. The main header features the title "Data Indonesia, Dalam Satu Portal" and the tagline "Temukan data-data Pemerintah dengan mudah!". Below this is a search bar with a dropdown menu set to "Semua Data" and the text "Cari Data Publik Indonesia". A vertical "Topik" (Topic) sidebar lists various categories: Pertahanan dan Luar Negeri, Ekonomi dan Industri, Pembangunan Daerah, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Ketertiban Umum dan Keselamatan, Pendidikan dan Tenaga Kerja, Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Budaya dan Agama, Pemerintahan Umum, and Pendukung Umum. The "Dataset Trending" section displays four featured datasets, all titled "Banjarnegara Dalam Angka BDA 2021" and published by "Pemerintah Kabupaten Banjar Negara" on "12 Jan 2021". A "Lihat Semua" (View All) link is located to the right of this section.

6 *Scope* dan Fitur Utama Portal SDI



Standarisasi

Penyediaan standar data kode referensi, metadata, data induk.



Konten

CMS portal satu data yang sangat bervariasi mulai dari manajemen layout portal, fitur pencarian, editing berita, editing foto, editing produk, dan lain sebagainya.



User Access

User (pengguna) yang akan memiliki beberapa role yang berfungsi untuk membatasi akses ke setiap modul, serta fitur yang dapat digunakan pada suatu modul. Data Kode Referensi, metadata, data induk.



Data Katalog

Katalog data berfungsi sebagai daftar katalog data yang dimiliki oleh member (walidata) dengan informasi detail yang terstandar beserta data variabel meta datanya.



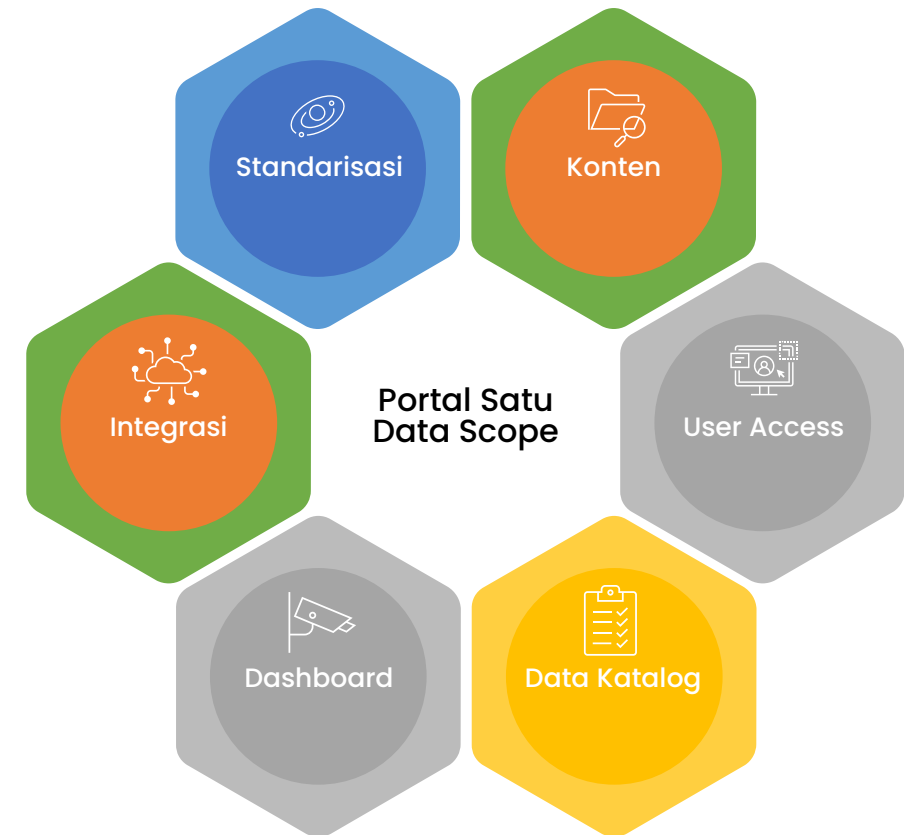
Dashboard

Dashboard kesiapan SDI, *Dashboard executive*, dan *dashboard analytic*.



Integrasi

Menarik data dari walidata dan K/L.



Terima Kasih

Salam Satu Data



@data.go.id



@datagoid



www.facebook.com/datagoidofficial

CONTACT:

1. **Andri** – Manajer Perencanaan, Analisa dan Pemanfaatan Data (telp: 0857 8012 3626)
2. **Hendra** – Manajer Tata Kelola (telp: 813 8892 1369)
3. **Tommy** – Manajer Aplikasi dan Teknologi (telp: 812 9248 446)